BAB I
PENDAHULUAN

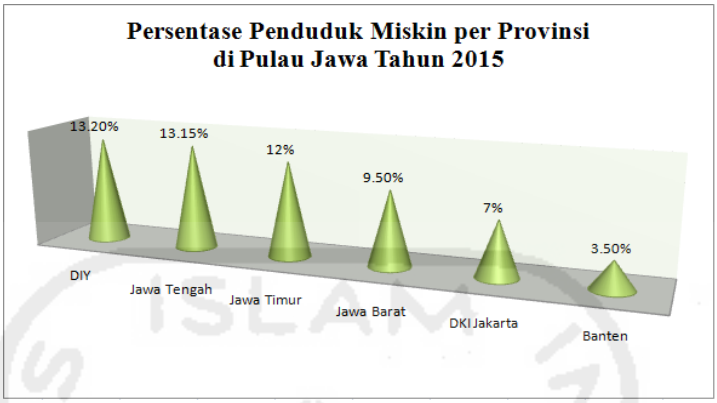
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan pelik bagi Indonesia meski hal yang sama terjadi di hampir semua negara berkembang di dunia (Wardhana, 2015). Menurut Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Indonesia secara perlahan mengalami penurunan. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin menurun 0,36 persen dibandingkan Maret 2015. Dari segi jumlah, penduduk miskin di Indonesia sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan 2015, meskipun secara persentase mengalami penurunan. Tahun 2016, persentase kemiskinan berhasil ditekan dan selaras dengan jumlah penduduk miskin yang berkurang 0,58 juta jiwa dibandingkan tahun 2015.

Menurut buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015 yang di publikasi oleh Badan Pusat Statistik, masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dalam Prastyo, 2010).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia masih 2,8 juta atau 1,122% dari jumlah penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Angka kemiskinannya pada 2015 tercatat 13,20% atau lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang sebesar 11,13%. Mengutip data BPS 2016, dari enam provinsi di Pulau Jawa, tiga di antaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional, yakni DIY 13,20%, Jawa Tengah (13,15%) dan Jawa Timur (12%). Sedangkan, tiga provinsi lain tingkat kemiskinannya di

bawah rata-rata nasional, yakni Jawa Barat (9,50%), Banten (7%), dan DKI Jakarta (3,5%). (Subroto, 2015)

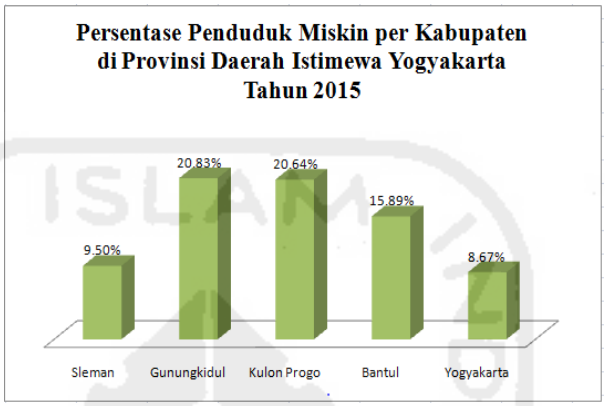


Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin tiap Provinsi di Pulau Jawa

Menurut Wardhana (2015), DIY memiliki pesona yang luar biasa, akan tetapi DIY menyimpan masalah kependudukan yang begitu parah. Tingkat kemiskinan penduduk DIY tertinggi se-Jawa. Tingginya angka kemiskinan di DIY menjadikan pekerjaan rumah penting bagi pemerintah setempat. Di lihat dari sisi sektor penyumbang kemiskinan di DIY, maka sektor pangan menyumbang kemiskinan lebih besar dibandingkan sektor nonpangan seperti sektor perumahan, sandang, pendidikan, dan sektor kesehatan. Sumbangan sektor pangan atau makanan/minuman terhadap garis kemiskinan pada September 2013 mencapai 72,22 persen tidak jauh berbeda dengan September 2012 sebesar 71,50 persen (Saragih,2015).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi DIY terbagi menjadi 5 kabupaten yaitu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Pada data Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2015 di Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebanyak 53.259 jiwa atau 14,55 % dari jumlah penduduk di DIY. Bersadarkan data tersebut persentase penduduk miskin masing-masing kabupaten yaitu untuk Kota Yogyakarta sebesar 8,67%, untuk Kabupaten Sleman sebesar 9,5%, untuk Kabupaten Bantul sebesar

15,89%, untuk Kabupaten Kulon Progo 20,64% dan untuk Kabupaten Gunung Kidul sebesar 20,83%. Kabupaten Gunung Kidul menjadi kebupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di DIY dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainya.

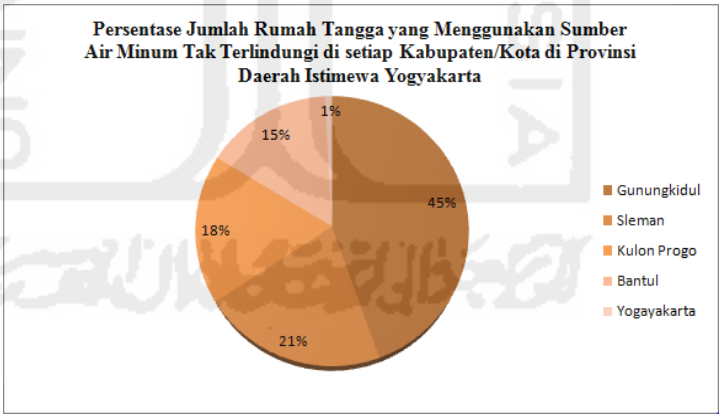


Gambar 1.2 Grafik Persentase Penduduk Miskin tiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak ± 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 desa (Badan Pengawasan dan Pembangunan, 2015).

Menurut Publikasi Indikator Kemiskinan tahun 2015 terdapat beberapa indikator dalam menentukan kemiskinan, salah satunya adalah perumahan dan lingkungan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011

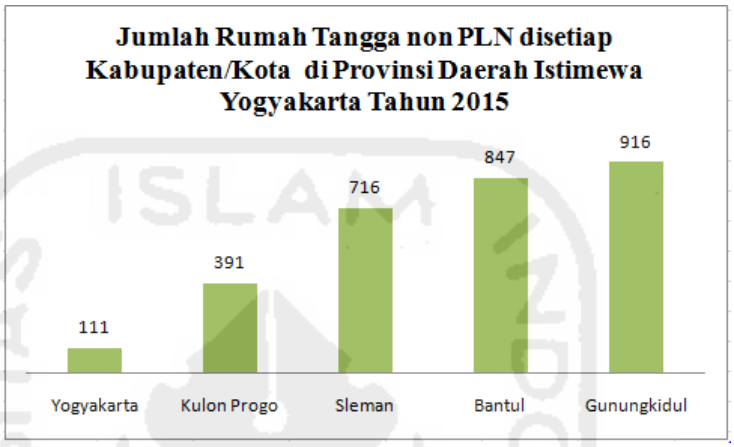
tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Menurut publikasi Indikator kemiskinan tahun 2015 terdapat beberapa variabel dalam menentukan tingkat kemiskinan berdasarkan sektor perumahan dan pemukiman, dimana variabel tersebut adalah luas lantai, lantai bangunan, dinding bangunan, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar masak. (Badan Pusat Statistik, 2015)



Gambar 1.3 Grafik Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tak terlindungi tiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut data pada gambar 1.3 yang diperoleh dari Tim Nasional Perepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, menunjukkan bahwa persentase tertinggi jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum tak terlindungi terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 45 %, sedangkan

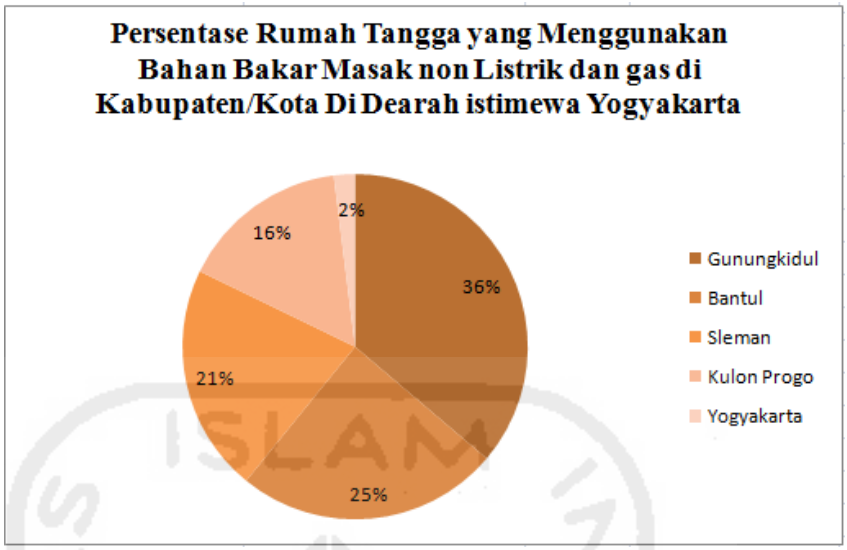
persentase terendah terdapat di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul harus menjadi prioritas Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPPSPAM) dalam menyelesaikan masalah Air minum.



Gambar 1.4 Grafik jumlah rumah tangga non PLN di setiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 1.4 menunjukan jumlah rumah tangga non PLN yang di peroleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015, jumlah rumah tangga non PLN tertinggi terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 916 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga non PLN terendah terdapat di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 111 rumah tangga.

Menurut publikasi Program Energi Alternatif dan Berkelanjutan di Asia oleh Bank dunia (2013), bahan bakar memasak rumah tangga indonesia telah mengalami pergeseran yang sangat dramatis selama beberapa tahun terakhir, sebagai hasil dari kesuksesan program konversi minyak tanah ke LPG yang dilaksanakan pemerintah. Akan tetapi program ini belum mampu menjangkau beberapa daerah miskin. Pada saat ini, 40 persen rumah tangga di Indonesia masih menggunakan bahan bakar biomassa tradisional untuk memasak. Rumah tangga ini terutama berada di daerah perdesaan yang tidak tersentuh oleh program konversi LPG dan penggunaan biogas juga kurang cocok.



Gambar 1.5 Grafik persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar masak non listrik dan gas di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan gambar 1.5 Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten dengan pengguna bahan bakar memasak non listrik dan gas tertinggi sebesar 36% dari total jumlah rumah tangga yang menggunakan bahan bakar memasak non listrik dan gas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan beberapa fakta yang dipaparkan di atas, maka pemerintahan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tantangan besar dalam mengatasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Gunungkidul khususnya kemiskinan, salh satunya pada sektor perumahan dan lingkungan.

Dalam melakukan penanganan permasalahan tersebut, maka dilakukan penggambaran permasalahan kemiskinan berdasarkan perumahan dan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskriptifkan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya (Irawan,2004), selanjutnya dilakukan pengelompokan desa-desa dengan karakteristik yang sama di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan analisis cluster yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek penelitian, dimana suatu kelompok mempunyai ciri-ciri yang relative sama(homogen), sedangkan antar kelompok memiliki ciri yang berbeda (Usman dalam Romaully, 2016) dan pemetaan daerah yang mengalami permasalahan kemiskinan pada

sektor perumahan dan lingkungan sehingga diharapkan mempermudah dalam visualisasi daerah mana saja yang mengalami masalah kemiskinan pada sektor perumahan dan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul, dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk acuan penanganan masalah kemiskinan secara tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan analisis *Cluster* hirarki aglomeratif dan pemetaan untuk mengetahui pengelompokan kemiskinan berdasarkan sektor perumahan dan lingkungan serta visualisasi peta sebaran kemiskinan berdasarkan sektor perumahan dan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 serta menggunakan desa sebagai objek penelitiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana gambaran permasalahan kemikinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan berdasarkan desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015?
2. Bagaimana pengelompokkan kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015?
3. Metode apakah yang terbaik untuk digunakan dalam pengelompokkan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan tahun 2015 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gambaran masalah kemiskinan pada sektor perumahan dan lingkungan tiap desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
2. Mengetahui pengelompokkan kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan menggunakan metode *single linkage*, *complete linkage* dan *average linkage* di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.
3. Mengetahui metode terbaik yang untuk digunakan dalam pengelompokkan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator kemiskinan ditinjau dari sektor perumahan dan lingkungan tahun 2015.

2.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian tersebut, Batasan masalah sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk itu batasan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan indikator kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.
2. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis *cluster hierarki aglomeratif* metode *Single* linkage, *Complete Linkage* dan *Average Lingkage* serta pemetaan.
3. Variabel yang digunakan yaitu jumlah rumah tangga yang menggunakan lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah, dinding bangunan terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban, sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik, air minum berasal dari sumur/air tidak terlindungi/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, per desa di Kabupaten Gunungkidul.
4. Perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu dalam analisis statistik yakni QGIS dan Pemograman R.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Hasil penelitian mengenai pengelompokkan daerah di Kabupaten Gunungkidul, dapat digunakan pemerintah untuk mengetahui daerah mana yang perlu dijadikan perhatian khusus serta menjadikan prioritas dalam melaksanakan program penganggulangan kemiskinan berdasarkan sektor perumahan dan pemukiman.
b. Hasil penelitian mengenai metode terbaik dalam melakukan analisis *cluster* tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.